

BAB III

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menyajikan pembahasan mengenai frame yang dibentuk oleh Metro TV dan TV One dalam berita-berita yang mengangkat sidang MKD. Sampel berita akan diulas dengan menggunakan metode analisis William. A Gamson dimana frame dipandang sebagai *package* atau kemasan bagaimana sebuah wacana diceritakan kepada khalayak.

Peristiwa sidang MKD ini menjadi berita utama di media-media di Indonesia karena nilai beritanya yang kuat, menyangkut hajat hidup orang banyak. Pertama pihak terlapor adalah Ketua DPR RI, Ketua Dewan yang mewakili suara rakyat, atas tuduhan pencatutan nama orang nomor satu di negeri ini yaitu Presiden Joko Widodo. Kedua, sidang ini menyangkut wacana Freeport yang telah lama beredar di tengah masyarakat.

Awal wacana ini terbentuk ditandai adanya laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Pada 16 November 2015 beliau membeberkan kronologis pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang dilakukan Ketua DPR RI Setya Novanto. Dalam peristiwa tersebut Sudirman Said mengatakan bahwa Setya Novanto dengan seseorang pengusaha yaitu Riza Chalid telah melakukan pertemuan dengan Presiden PT Freeport Indonesia Maroef

Sjamsueddin mengenai kontrak karya PT Freeport Indonesia. Tujuan pertemuan tersebut adalah membahas mengenai kontrak perpanjangan PT Freeport Indonesia, dan dalam pertemuan tersebut Novanto meminta saham 20 persen pada perusahaan tersebut. Tentu saja ini melanggar kode etik DPR sehingga Novanto di meja hijau dan kemudian diadili oleh MKD.

Pada 23 November 2015 MKD menggelar sidang pertama yang dilakukan secara terbuka. Wakil ketua MKD Junimart Girsang menguatkan usulan agar perkara sidang Setya Novanto digelar secara terbuka. Ada beberapa keputusan yang akan di ambil oleh MKD, hal tersebut dibahas melalui rapat internal. Yaitu mengenai sidang Novanto dilakukan secara terbuka atau tertutup. Pada 7 Desember 2015 sidang kode etik digelar tertutup di MKD, hal ini menimbulkan tanggapan negatif dari beberapa aktor politik maupun pengamat politik atas keputusan oleh MKD yang menggelar sidang secara tertutup.

Akbar Faisal dari fraksi NASDEM yang merupakan anggota MKD dinonaktifkan dari keanggotaan MKD oleh pimpinan MKD. Akbar Faisal dinonaktifkan dari MKD karena dinilai telah membocorkan isi persidangan ke media televisi swasta. Hal tersebut kemudian menjadi indikasi bentuk pertarungan politik dalam MKD.

Pada 16 Desember 2015 Setya Novanto resmi mengundurkan diri dari Ketua DPR. Seharusnya pada waktu itu sidang MKD akan memberi sanksi terhadap Setya Novanto. Namun sebelum sanksi tersebut dibacakan Setya Novanto terlebih dahulu mengundurkan diri melalui surat resmi yang dibacakan langsung oleh pimpinan MKD.

Baik TV One maupun Metro TV gencar memberitakan sidang MKD dengan konstruksi masing-masing. Konstruksi ini disusun dengan perangkat-perangkat frame hingga tersusun menjadi berita yang sampai kepada khalayak. Sampel berita yang akan diteliti berjumlah 6 buah masing-masing 3 buah dari TV One dan 3 buah dari Metro TV. Sampel akan diuraikan satu persatu dengan menggunakan analisis Framing model Wiliam A. Gamson dan Andrew Modigliani. Berikut ini tabel judul sampel berita:

Tabel 3.1 Objek Penelitian

Media	Tanggal	Berita
Metro TV	7/12/2015	1. Mengadili Etika Setya Novanto.
	16/12/2015	2. MKD Singkirkan Akbar Faisal.
	16/12/2015	3. Setya Novanto Mundur Hindari Sanksi
TV One	7/12/2015	1. Sidang Harus Tertutup Jika Mengacu Pada UU.
	16/12/2015	2. Akbar Faisal Dinonaktifkan dari MKD
	16/12/2015	3. Setya Novanto Mengundurkan Diri

1. Frame Sidang MKD Metro TV : Sidang MKD memihak kepada Setya Novnato dan tidak berpihak kepada rakyat.

Metro TV menurunkan laporan mengenai sidang MKD sebagai laporan utama dalam edisi 7 Desember sampai dengan 18 Desember 2015. Laporan utama itu terbagai atas tiga berita. Selama persidangan MKD dilaksanakan tensi politik memanas. Banyak terjadi interupsi diantara kedua belah pihak baik terlapor maupun pelapor dan kolega politiknya. Mulai dari bongkar pasang anggota MKD hingga saling melaporkan ke pihak yang berwajib. Manuver-manuver politik inilah yang kemudian menjadi liputan utama bagi media dan secara tidak langsung politisi-politisi yang bersangkutan turut melakukan komunikasi politiknya untuk mempengaruhi opini publik. Namun begitu media juga punya konstruksi tersendiri sesuai dengan agenda yang ingin dicapai.

Konstruksi sidang MKD yang dibangun oleh Metro TV melalui frame berita-beritanya adalah adanya kompromi politik selama sidang MKD untuk menyelamatkan Setya Novanto. Sidang MKD memihak kepada Setya Novanto dan tidak berpihak kepada rakyat.

Metro TV menurunkan laporan sidang MKD sebagai laporan utama. Laporan utama itu terbagai atas tiga berita, masing-masing berjudul: “Mengadili Etika Setya Novanto”, “MKD Singkirkan Akbar Faisal”, dan “Setya Novanto Mundur Hindari Sanksi”. Laporan yang diturunkan Metro TV

yang pertama yaitu citra MKD di mata masyarakat. Peristiwa ini di kemas dalam berita yang berjudul “Mengadili Etika Setya Novanto” yang meliput rangkaian sidang MKD dengan agenda kesaksian dari terlapor yaitu Setya Novanto. Sudut pandang yang digunakan Metro TV yaitu dari sisi kecurigaan publik tentang perubahan tata acara persidangan yang tiba-tiba. Setelah sebelumnya terbuka, sidang ini justru ditutup untuk publik.

Metro TV menyertakan penalaran akan tertutupnya sidang karena adanya kompromi politik antara terlapor dan anggota sidang MKD. Dari sudut pandang ini, Metro TV mencitrakan MKD secara buruk. MKD dinilai berlawanan dengan kepentingan publik. Sebagai Mahkamah yang mengawasi kehormatan institusi dan anggota DPR, MKD justru tidak menjaga kehormatannya sendiri.

Kedua yang diangkat oleh Metro TV yaitu mengenai citra buruk jalannya persidangan itu sendiri. Laporan ini disampaikan melalui berita yang berjudul “MKD singkirkan Akbar Faisal”. Berita ini mengangkat peristiwa penonaktifan Akbar Faisal secara tiba-tiba di saat jalannya sidang MKD yang menghadirkan pihak terlapor. Metro TV mengemas berita ini dengan sudut pandang yang membela Akbar Faisal. Penonaktifan tersebut dinilai tidak sesuai dengan tata cara yang berlaku di MKD selama ini. Bahkan Metro TV menuding Fahri Hamzah selaku Ketua Dewan sementara menyalahgunakan wewenangnya untuk menyingkirkan anggota MKD yang tidak mendukung

Setya Novanto. Dalam berita ini juga, Metro TV melabeli Akbar Faisal sebagai anggota parlemen yang berpihak kepada rakyat.

Laporan berita yang terakhir yaitu mengenai citra Setya Novanto. Berita ini sangat kuat pengaruhnya dalam pembentukan frame Metro TV terkait sidang MKD karena Novanto merupakan tokoh sentral dalam kasus ini. Dalam berita yang berjudul “Novanto Mundur Hindari Sanksi”, Metro TV menggunakan sudut pandang yang melemahkan citra Setya Novanto. Pengunduran diri yang dilakukan olehnya dikala sidang tinggal menunggu putusan dinilai hanya sebagai strategi licik untuk mengelabui sanksi MKD.

Dalam berita tersebut Setya Novanto terkesan tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Justru ia lari dengan alibi untuk meredakan polemik ditengah masyarakat karena kasus yang melibatkan dirinya ini. Kelicikan Novanto berhasil menyelamatkan posisi politik dan juga bisnisnya dari kehancuran. Karena dengan pengunduran diri ini MKD tidak bisa menjatuhkan vonis kepadanya meskipun voting telah dilakukan dan hasilnya menyatakan bahwa Setya Novanto bersalah, melakukan pelanggaran sedang. Dan sanksi yang seharusnya didapatnya adalah pemecatan secara tidak hormat berhasil dihindari.

a. Elemen Inti Berita

Dalam pandangan Metro TV, banyak terjadi keganjilan dalam pelaksanaan sidang MKD. Pada sidang yang menghadirkan terlapor yaitu Setya Novanto, anggota MKD sepakat melaksanakannya secara tertutup. Padahal sidang sebelumnya dilaksanakan secara terbuka yaitu ketika sidang menghadirkan Menteri ESDM sebagai pelapor dan sidang yang menghadirkan saksi yaitu Direktur PT Freeport Indonesia. Tidak ada alasan yang jelas dari MKD mengenai perbedaan ini.

Metro TV menempatkan tertutupnya Sidang MKD dalam wilayah penyimpangan dengan menyandarkan konstruksinya pada penolakan dari masyarakat, kecurigaan masyarakat mengenai alasan kenapa sidang dilakukan secara tertutup. Dengan mengikut sertakan publik sebagai penilai, konstruksi berita dibandingkan langsung dengan nilai yang ada dalam masyarakat dan juga berita terkesan lebih objektif.

“Tidakkah anda lihat bahwa pertarungan, MKD, mahkamah kehormatan dewan yang seharusnya dijaga adalah kehormatan institusi dan anggotanya, tapi apa yang terjadi hari ini membuat masyarakat sangat kecewa, opini publik sangat keras mengancam adanya perbedaan pada sidang hari ini..”

Dalam teks di atas Metro TV juga menggambarkan citra MKD dengan citra buruk. MKD dicitrakan melenceng dari fungsinya dengan tidak menjalankan amanat rakyat untuk menjaga kehormatan institusi DPR beserta anggotanya. Bahkan MKD dituding melakukan kompromi politik untuk

menyelamatkan Setya Novanto sehingga sidang tersebut dilaksanakan secara tertutup.

“Kalau publik sudah tahu, dibalik itu ada udang dibalik batu..”

“Dalam artian ada sesuatu? Apakah itu uang ditawarkan, jabatan atau apa?”

“Benar, saya ini anggota DPR sudah merasa malu, saya dari rumah naik taksi, orang melihat saya seperti mencibir, nah itu anggota DPR, jadi yang ingin aku katakan ini bukan masalah hukum ini masalah etika, nanti saya akan tanya ke pengacara Setya Novanto, kau mau bela masalah apa, kalau masalah hukum jelas tugas lawyer, kalau etika saya nggak ngerti, jadi di MKD ini apa yang harus dilakukan, merujuknya pada fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan”

Selain itu, keganjilan lainnya seperti pembelaan lawyer Setya Novanto yang ia samapaikan di media, yang dinilai tidak tepat bila menyangkut masalah etika, ia seharusnya membela karena masalah hukum pidana ataupun perdata.

“Nanti saya akan tanya ke pengacara Setya Novanto, kau mau bela masalah apa, kalau masalah hukum jelas tugas lawyer, kalau etika saya nggak ngerti, jadi di MKD ini apa yang harus dilakukan, merujuknya pada fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan”.

Keganjilan sidang MKD juga dinilai saat Akbar Faisal dinonaktifkan dari MKD. Wakil dari fraksi Nasdem dalam MKD ini memang dikenal lantang dan kritis selama proses persidangan. Ia juga tidak segan berkomentar pedas di depan media. Penonaktifannya didasari oleh surat pemberhentian dari Ketua Dewan Fahri Hamzah yang kemudian dipatuhi oleh MKD. Metro TV menganggapnya sebagai sebuah kezaliman karena tidak menggunakan prosedur yang benar dan sekaligus dicap sebagai penyalahgunaan wewenang

Wakil DPR Fahri Hamzah. Sehingga penonaktifan ini terkesan dilakukan untuk menyingkirkan lawan politik yang mengganggu penyelamatan Setya Novanto.

“..selama ini kalau sidang-sidang di MKD ini tata acara di MKD ini mesti harus ada klarifikasi dulu kemudian pak Akbar dipanggil dulu bagaimana klarifikasi tidak semacam ini nah ini yang perlu kita telusuri apakah ini betul sudah merupakan keputusan bulat dari MKD atau apakah ini dari memang unsur ketua DPR”.

Selanjutnya Metro TV secara tidak langsung melabeli pemecatan Akbar sebagai ketidakadilan MKD pasalnya sebelumnya Akbar Faisal juga melaporkan anggota MKD ke pimpinan DPR dan tidak ada tanggapan. Namun laporan dari pihak lain justru ditanggapi bahkan sekarang Akbar Faisal dikeluarkan dari MKD dengan surat langsung dari pimpinan dewan. Pemaparan ini memperkuat bingkai yang dibangun dalam berita. Teks beritanya sebagai berikut:

“..Akbar Faisal sebelumnya juga sudah mengadukan tiga orang anggota MKD ke pimpinan tetapi tidak di gubris oleh pimpinan. Malah yang digubris adalah pengaduan Ridwan Bae kepada pimpinan, tentu hal ini adalah sebuah kezaliman yang dilakukan oleh pimpinan Dewan, dan tentu seluruh masyarakat Indonesia akan melihat kezaliman ini..”

Metro TV juga mengangkat penonaktifan Akbar Faisal sebagai kejadian yang bisa merusak citra DPR dikemudian hari karena tindakan yang tidak sesuai prosedur dan terkesan penyalahgunaan wewenang oleh Fahri Hamzah. Selain itu, perekaman jalannya sidang MKD yang dilaksanakan secara tertutup oleh Akbar Faisal dinilai sesuai dengan harapan rakyat yang

ingin mengawal jalannya sidang. Kemudian berita juga menitik beratkan pada citra Akbar Faisal yang notabene adalah kader Partai Nasdem, sebagai harapan rakyat untuk parlemen bersih dikemudian hari. Berikut teks beritanya:

“.. kami juga akan sampaikan kepada kensekuen kami dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa telah terjadi kezaliman yang dilakukan oleh pimpinan Dewan yang merusak seluruh tatanan yang ada di parlemen ini, dan akan semakin *men-down grate* parlemen ini di depan masyarakat dan mata masyarakat. Tentunya ini akan menjadi citra buruk parlemen dikemudian hari.”

“..menurut kami apa yang sudah dilakukan akbar faisal adalah apa yang diminta oleh rakyat Indonesia dan akbar menjadi satu ikon di masyarakat yang tetap pada amanah yang dikehendaki rakyat terhadap kemurnian parlemen ini di kemudian hari..”

Gagasan terakhir adalah ketika Setya Novanto mengundurkan diri sehingga sidang MKD dinyatakan selesai dan tidak bisa dilanjutkan. Di saat sidang tinggal menunggu keputusan, secara mengejutkan Setya Novanto menyatakan mengundurkan diri melalui surat pengunduran diri yang dibacakan ketua Sidang MKD yaitu Khahar Muzakir yang juga dari fraksi Golkar.

Dalam pandangan Metro TV, pengunduran diri Setya Novanto tidak perlu diapresiasi oleh semua pihak terutama masyarakat. Konstruksi ini menyanggah pernyataan dari Setya Novanto sendiri perihal pengunduran dirinya dari jabatan Ketua DPR. Melalui surat pengunduran diri maupun

konferensi pers, ia mengatakan mundur untuk menjaga kestabilan DPR dan ketenangan masyarakat.

Namun dalam berita ini, pengunduran diri Setya Novanto dianggap sebagai sebuah klimaks drama yang penuh dengan intrik politik. Tindakan ini dinilai untuk menghindari sanksi yang akan dijatuhkan oleh MKD yaitu pencabutan jabatan atau pemecatan. Teks beritanya sebagai berikut :

“Pengamat politik Burhanudin Muhtadi menilai keputusan untuk mundur dari kursi ketua wakil rakyat tidak perlu diapresiasi, menurutnya sikap Setya Novanto bukan sikap ksatria, Novanto mundur untuk menghindari sanksi”.

Dalam teks di atas, Metro TV juga menekankan sikap atau tindakan Setya Novanto mundur menjelang putusan MKD sebagai sikap seorang pengecut, bukan sikap ksatria. Pengunduran diri Setya Novanto dianggap sebagai strategi untuk mengelabui MKD. Dengan mundur sebelum putusan dibacakan, MKD tidak bisa menjatuhkan sanksi apapun kepadanya, bahkan keputusan sidang pun tidak ada. Setya Novanto berhasil menjaga statusnya sebagai anggota DPR aktif, walaupun tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPR. Untuk di masa yang akan datang, Setya Novanto masih berhak dan memenuhi syarat untuk menjabat semua posisi di DPR termasuk Ketua MKD sekalipun.

Berikut teks beritanya :

“...dan saat ini Novanto telah berhasil mengelabui sanksi jika mengacu pada peraturan DPR itu artinya Novanto masih bersih dan memenuhi syarat untuk kembali menduduki jabatan apapun di DPR..”

“Dia bahkan, ini lelucon diantara kawan kawan, dia bahkan bisa menduduki sebagai ketua MKD atau misalnya balik kandang sebagai ketua DPR”.

b. Perangkat Framing

Dalam analisis framing strategi bahasa yang digunakan seperti pemakaian kata, kalimat dan gambar bukan hanya dipandang sebagai penyajian berita. Namun juga sebagai strategi wacana untuk menekankan makna atau mengedepankan pandangan tertentu agar lebih diterima oleh khalayak sebagai sebuah fakta yang benar. Ide wacana dikemas dengan simbol-simbol bahasa yang dekat dengan pemahaman khalayak, dengan begitu makna yang dikonstruksi diharapkan mampu mempengaruhi perspektif khalayak akan sebuah peristiwa atau citra tokoh tertentu. Strategi ini diuraikan dengan perangkat-perangkat framing.

Elemen dalam perangkat pembingkai yang digunakan Metro TV dipakai untuk memberikan citra tertentu pada peristiwa Sidang MKD. Pertama, dalam teks berita Metro TV perangkat pembingkai ini memberikan citra buruk pada pelaksanaan sidang MKD. Metro TV menduga ada sesuatu yang tidak beres dengan menggunakan *metafora* “ada udang di balik batu” yang berarti ada maksud tersembunyi atau mencurigakan. Kemudian maksud tersembunyi yang dimaksud adalah apa yang terjadi di dalam sidang yang digambarkan seperti “kentut”, bau busuknya terasa namun tidak bisa dilihat.

Selanjutnya citra buruk pelaksanaan sidang MKD juga digambarkan pada peristiwa penonaktifan Akbar Faisal. Metro TV menilai proses

pemecatannya tidak sesuai dengan aturan tata cara MKD sendiri. Dengan perangkat *cathchphrases*, diambil dari pernyataan kader Nasdem, yang menyatakan akan melakukan perlawanan terhadap apa yang dilakukan oleh pimpinan DPR. Pernyataan ini mengesankan penonaktifan Akbar Faisal sebagai sebuah tindakan yang perlu dilawan dalam artian Metro TV menganggap tindakan ini sebagai serangan politik yang melemahkan fraksi Nasdem di MKD. Sebagai berikut:

“kami akan lawan apa yang dilakukan Fahri Hamzah, seluruh fraksi saya akan melawan kezaliman ini..”

Peristiwa tersebut dilabeli sebagai sebuah kezaliman (*Depiction*) yang dilakukan oleh Wakil Ketua Dewan yaitu Fahri Hamzah dari fraksi PKS. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kezaliman berarti kebengisan; kekejaman; ketidakadilan (sumber: <http://kbbi.web.id/zalim>). Dalam konteks berita, disebut kezaliman karena penonaktifan Akbar Faisal dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang ketua Dewan demi tujuan tertentu. Selain itu pemecatan juga dicap sebagai kekeliruan yang perlu dibenarkan karena tidak memakai prosedur yang resmi. Teks beritanya sebagai berikutnya :

“..hal ini adalah sebuah kezaliman yang dilakukan oleh pimpinan Dewan, dan tentu seluruh masyarakat Indonesia akan melihat kezaliman ini..”

“..bahwa telah terjadi kezaliman yang dilakukan oleh pimpinan Dewan yang merusak seluruh tatanan yang ada di parlemen ini..”

“Selama ini tidak pernah ada sidang MKD yang memberhentikan sekilat ini sehingga ini merupakan hal yang perlu diluruskan dan ini menjadi hal yang tidak benar menurut saya”

Selanjutnya untuk memperkuat bingkai berita, Metro TV juga menyertakan perangkat *exemplaar* yang membandingkan peristiwa ini dengan aduan Akbar Faisal yang tidak ditanggapi oleh ketua Dewan. Sedangkan aduan lainnya ditanggapi bahkan sekarang beliau sendiri mendapat sanksi. Perangkat ini digunakan untuk menunjukkan bahwa pemecatan sebagai sebuah ketidakadilan, hal ini juga memperkuat bingkai berita. Kemudian proses pemecatan dianggap tidak menggunakan prosedur resmi MKD dengan memaparkan proses yang seharusnya dilakukan, sebagai berikut:

“..Akbar Faisal sebelumnya juga sudah mengadukan tiga orang anggota MKD ke pimpinan tetapi tidak di gublis oleh pimpinan. Malah yang digublis adalah pengaduan Ridwan Bae kepada pimpinan..”

“..selama ini kalau sidang-sidang di MKD ini tata acara di MKD ini mesti harus ada klarifikasi dulu kemudian pak Akbar dipanggil dulu bagaimana klarifikasinya..”

Kedua, perangkat pembingkai untuk memberi citra buruk pada MKD. Dengan ungkapan “masuk angin” anggota MKD dilihat adanya perubahan sikap mendukung terlapor. Oleh karenanya MKD dicurigai melakukan persetujuan tertentu dengan Setya Novanto.

Persidangan juga dinilai konyol dan memalukan dengan menggunakan kalimat kiasan “kodoknya Presiden ketawa”. Metafora ini dimaksudkan untuk mengejek MKD karena menggunakan hewan yang diasosiasikan

dengan perbuatan manusia yang dipicu keganjialan yaitu tertawa. Teks beritanya sebagai berikut:

“Menurut anda kawan-kawan di MKD ini masuk angin atau tidak?”

“Dalam artian ada sesuatu? Apakah itu uang ditawarkan, jabatan atau apa?”Sudahlah, nanti kodoknya presiden ketawa”

Kalimat “kodoknya presiden ketawa” juga termasuk *cathchphrases* dalam berita ini. Jargon ini diulang hingga dua kali pengucapan untuk mewakili apa yang terjadi di dalam sidang. Tertutupnya sidang menunjukkan keputusan anggota MKD yang dinilai konyol hingga membuat kodok presiden tertawa. Secara nalar sidang tidak perlu ditutup apabila tidak ada yang disembunyikan. Toh sidang sebelumnya dilakukan secara terbuka, setidaknya publikpun sudah mengetahui dimana duduk perkaranya. Teks beritanya sebagai berikut:

“Sudahlah lama-lama kodok peliharaannya pak Jokowi bisa tertawa terbahak-bahak karena melihat kawan-kawan di MKD ini “

Kemudian keputusan MKD menutup sidang dilabeli sebagai tindakan mencurigakan dengan ungkapan “kentut”dengan konotasi yang berarti perbuatan licik. Selain itu keputusan ini juga dianggap memalukan, menurunkan harkat martabat DPR sebagai wakil rakyat. Karena dianggap tidak berpihak kepada rakyat dengan menutup-nutupi jalannya sidang. Dengan *depiction* sebagai berikut :

“Anda tahu kentut? ada tapi tidak keliatan, nah inilah yang sedang terjadi”

“..saya ini anggota DPR sudah merasa malu, orang ngeliat saya seperti mencibir, nah itu anggota DPR..”

Konstruksi dalam berita ini pun diperkuat dengan *exemplaar* yang mengingatkan khalayak pada tugas MKD untuk menjaga dan mengawal kehormatan institusi dan anggotanya dalam hal ini adalah DPR dan langsung membandingkan dengan peristiwa sidang yang dilaksanakan secara tertutup.

“Tidakkah anda lihat bahwa pertarungan, MKD, mahkamah kehormatan dewan yang seharusnya dijaga adalah kehormatan institusi dan anggotanya, tapi apa yang terjadi hari ini membuat masyarakat sangat kecewa, opini public sangat keras mengancam adanya perbedaan pada sidang hari ini..”

Selanjutnya unsur gambar dalam berita menunjukkan citra pelaksanaan sidang MKD. Gambar gerombolan wartawan dan keamanan di luar ruang sidang MKD diberi keterangan “Mengadili Etika Setya Novanto”, yang terlihat menunggu informasi mengenai jalannya sidang yang pada saat itu sidang dilakukan secara tertutup. Dengan bantuan foto (visual image), secara tidak langsung membawa khalayak berita ke dalam emosi penasaran, ketegangan dengan harap harap cemas yang dirasakan oleh wartawan atas pelaksanaan tertutupnya sidang tersebut. Gambarnya sebagai berikut:



Gambar 3.1 Screenshot berita “Mengadili Setya Novanto”

Tujuan ketiga yaitu untuk menjatuhkan citra Setya Novanto sebagai tokoh sentral dalam persidangan ini. Citra Novanto sangat erat kaitanya dengan konstruksi sidang MKD yang dibangun karena baik buruknya sidang MKD tergantung dimana memosisikan siapa lawan siapa kawan. Metro TV cenderung menempatkan Setya Novanto pada posisi musuh rakyat. Sebaliknya Metro TV mencitrakan Akbar Faisal kader Nasdem sebagai ikon anggota DPR yang amanah. Hal ini tentunya berkaitan dengan pemecatan karena membocorkan sidang MKD.

“dan akbar menjadi satu ikon di masyarakat yang tetap pada amanah yang dikehendaki rakyat terhadap kemurnian parlemen ini di kemudian hari..”

Untuk membangun konstruksinya tentang Setya Novanto, Metro TV menggunakan perangkat pembingkai *cathchphrases* yang menonjolkan tindakan pengunduran diri Setya Novanto sebagai perbuatan yang menyimpang. Dalam artian bahwa tindakan ini menyalahi tanggung jawabnya sebagai Ketua wakil rakyat di DPR sehingga tidak perlu diapresiasi. Jika dirujuk kepada fungsinya, persidangan etik pun dilaksanakan untuk kepentingan rakyat, menertibkan wakil rakyat yang melanggar kode etik pekerjaannya.

“Keputusan untuk mundur dari kursi ketua wakil rakyat tidak perlu diapresiasi..”

Metro TV juga menggunakan *depiction* untuk melabeli pengunduran diri Setya Novanto sebagai drama yang penuh dengan intrik politik. Pemakaian kata drama menunjukkan bahwa Metro menganggap tindakan-tindakan Setya Novanto selama persidangan MKD seperti tontonan yang penuh kepura-puraan. Kemudian pemakaian kalimat intrik yang berarti penyebaran kabar bohong yang sengaja untuk menjatuhkan lawan (<http://kbbi.web.id/intrik>), yang menunjukkan bahwa pengunduran diri sebagai persengkongkolan Setya Novanto dengan MKD.

“Pemirsa drama yang disajikan mantan ketua DPR Setya Novanto penuh dengan intrik politik..”

Selanjutnya Metro TV menggunakan perangkat *depiction* untuk menggambarkan citra buruk Setya Novanto terkait dengan pengunduran diri ini. Tindakan ini dianggap tidak mencerminkan sikap ksatria melainkan tindakan seorang pengecut. Selain itu, dengan menggunakan kata pintar dan lihai yang secara halus menyindir Setya Novanto. Hal ini menggiring pemahaman khalayak pada pemahaman citra Setya Novanto licik. Teks beritanya sebagai berikut:

“Menurutnya sikap Setya Novanto bukan sikap ksatria..”

“Dia pintar membaca situasi dan lihai memanfaatkan celah yang ada untuk kepentingan dirinya..”

Kemudian Metro TV memperkuat konstruksinya dengan menguraikan strategi licik yang dilakukan oleh Setya Novanto yang membuat statusnya

menjadi tidak bersalah. Membandingkan dengan frame aturan formal ini konstruksi Metro TV mengenai citra Novanto. Berikut teks beritanya :

“Meskipun tentu ada banyak yang mengatakan mana mungkin karena cap buruk sudah di tempelkan, tetapi secara formal dia tidak dinyatakan bersalah karena dia mengundurkan diri sebagai ketua DPR bukan dinyatakan secara etik”.

Dalam berita ini gambar atau klip video yang digunakan untuk memperkuat penekanan citra Novanto dan partainya Golkar, sebagai berikut :



Gambar3.2 Setya Novanto dalam acara partai Golkar

Dalam video berita *news anchor* membacakan narasi berita yang menceritakan pengunduran diri Setya Novanto berdasarkan pengamat politik Burhanudin yang menganggap tindakan Setya Novanto tidak mencerminkan sikap kesatria ketika video pada gambar di atas diputar. Video dan narasi mengarah pada citra Novanto yang dibentuk melalui berita ini.

Dengan jenis shot *fullshot* dan *panning* kamera menunjukkan bahwa Setya Novanto sedang bersama dengan partainya Golkar. Dia juga duduk di deretan depan yang menunjukkan posisinya di Partai sebagai jajaran atas di partainya. Selanjutnya disambung dengan *angle close up* agar *focus* pada

bahasan berita yaitu Setya Novanto. Dari gambar tersebut bias disimpulkan bahwa citra buruk Novanto sama dengan citra buruk Golkar. Selain itu, pakaian juga menunjukkan citra tertentu. Dalam video Novanto tidak menggunakan jas berwarna kuning melainkan hanya menggunakan kemeja yang terkesan tidak rapi karena kancing atasnya tidak dikaitkan dan juga kerah bajunya yang tinggi, kesan yang didapat memperkuat citranya sebagai orang yang licik, kebal hukum dan bahkan seorang mafia.

c. Perangkat Penalaran

Ide atau pemikiran yang dikembangkan dalam teks berita ini didukung dengan perangkat penalaran untuk menekankan kepada khalayak bahwa “versi berita” yang disajikan dalam teks itu adalah benar. Metro TV menggunakan penalaran-penalaran yang mendasari konstruksi sidang MKD berpihak kepada Setya Novanto. Perangkat penalaran *Roots* yang dipakai untuk meyakinkan logika sebab-akibat khalayak adalah untuk menekankan keganjilan dan kecurangan pelaksanaan sidang MKD.

Perangkat *roots* yang pertama, dengan membandingkan sidang-sidang terdahulu yang dilaksanakan secara terbuka sedangkan ketika sidang Setya Novanto ditutup. Metro TV memberi spekulasi adanya maksud tersembunyi dan mencurigakan. Secara nalar hal yang perlu dicurigai adalah suatu yang tidak benar atau kejahatan. Metro TV menggiring kepada makna adanya

kemungkinan kecurangan sidang dengan tujuan membebaskan Setya Novanto.

Hal ini membuka penalaran bahwa ada sesuatu dibalik tertutupnya sidang.

“Sidang yang hari ini dilakukan dengan sedikit berbeda yakni dilakukan secara tertutup.. kalau publik sudah tahu, dibalik itu ada udang dibalik batu”

Perangkat *roots* yang selanjutnya mendasari bingkai penonaktifan Akbar Faisal sebagai sebuah kezaliman karena tindakan tersebut menyalahi etika dan penyalahgunaan wewenang. Sebagai Wakil dari fraksi Nasdem yang punya hak menjadi anggota MKD tidak sepatutnya dipecat dengan cara seperti ini, tidak menggunakan prosedur yang semestinya. Tindakan perekaman yang dilakukan Akbar Faisal mewakili kehendak rakyat. Karena tertutupnya sidang membatasi akses keingintahuan rakyat tentang jalannya sidang. Transparasi sidang MKD dinilai sebagai acuan kebersihan parlemen yang memang harus mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada rakyat. Sebagai berikut:

“..karena menyalahi etika dan penyalah gunakan wewenang.”

“..karena menurut kami apa yang sudah dilakukan Akbar Faisal adalah apa yang diminta oleh rakyat Indonesia dan akbar menjadi satu ikon di masyarakat yang tetap pada amanah yang dikehendaki rakyat terhadap kemurnian parlemen ini di kemudian hari”

Perangkat *roots* yang ketiga mendasari alasan Setya Novanto mengundurkan diri sesaat sebelum ketok palu. Padahal sebenarnya telah ada informasi yang tersebar di media massa mengenai hasil voting anggota MKD dalam memutuskan bobot pelanggaran Setya Novanto. Dari 17 anggota MKD,

10 diantaranya menyatakan Novanto melakukan pelanggaran sedang sedangkan 7 sisanya menganggapnya sebagai pelanggaran berat. Namun, sebelum sanksi dijatuhkan Setya Novanto terlebih dulu mengundurkan diri. Kemudian Metro TV mengkonstruksi pengunduran diri tersebut sebagai strategi untuk menghindari sanksi sehingga tidak perlu diapresiasi oleh masyarakat. Melalui *roots* ini juga, secara tidak langsung Metro TV menyanggah alasan Setya Novanto melalui suratnya. Ia ingin menjaga harkat martabat, DPR dan menenangkan masyarakat.

“Keputusan untuk mundur dari kursi Ketua Wakil Rakyat tidak perlu diapresiasi, menurutnya sikap Setya Novanto bukan sikap ksatria, Novanto mundur untuk menghindari sanksi.”

Keganjilan lainnya pada sidang MKD secara tidak langsung mempengaruhi citra MKD dan juga DPR di masyarakat. Citra yang terbentuk adalah MKD tidak jeli, tidak tegas dan tidak amanat. Penalarannya dengan menyertakan premis dasar (*appeals to principiel*) bahwa masalah ini merupakan masalah etik non hukum yang seharusnya merujuk pada kode etik yang melingkupi kinerja DPR yaitu legislasi, budgeting dan pengawasan. Secara tidak langsung Metro TV menyindir pihak terlapor karena tindakan pembelaannya melalui kuasa hukum yang menyiratkan adanya unsur politis.

“saya tidak bisa menerima argumentasi siapapun dia kawan kawan di MKD, itu gimana yang bersangkutan meminta terbuka atau tertutup, ini masalah etika bukan masalah hukum, kalau masalah hukum jelas tugas lawyer, kalau etika saya nggak ngerti, jadi di MKD ini apa yang harus dilakukan, merujuknya pada fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan”

Kedua, sudut pandang atas peristiwa pemecatan Akbar Faisal yang disandarkan pada dua premis dasar (*appeals to principil*) yaitu tindakan pemecatan akan merusak tatanan parlemen dalam artian merusak sistem kerja, fungsi dan nilai demokrasi yang ada. Pemecatan Akbar faisal bukan kehendak dari anggota MKD atau dengan kata lain pemecatan dilakukan atas paksaan ketua Dewan. Metro TV menekankan adanya kepentingan politik untuk menyingkirkan lawan, orang yang tidak bisa diajak kerja sama untuk menyelamatkan Setya Novanto, sebagai berikut:

“..kami juga akan sampaikan kepada kensekuen kami dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa telah terjadi kezaliman yang dilakukan oleh pimpinan Dewan yang merusak seluruh tatanan yang ada di parlemen ini”

“..Kami sudah menyanjakan kepada MKD bahwa MKD tidak pernah ingin mengeluarkan Akbar Faisal dari MKD”

Metro TV mengembangkan konstruksi pengunduran diri sebagai strategi untuk menghindari sanksi. Karena ketika Setya Novato mundur, MKD tidak bisa lagi menjatuhkan vonisnya. Dengan kata lain Setya Novanto berhasil mengakali peradilan MKD untuk kepentingannya di waktu sebelum vonis diputuskan. Oleh karenanya ia masih tercatat sebagai anggota DPR yang bersih dari pelanggaran. Setidaknya Novanto menghapus satu catatan buruk yang nantinya dapat mempengaruhi karir politiknya di masa yang akan datang.

“Secara formal dia tidak dinyatakan bersalah karena dia mengundurkan diri sebagai ketua DPR bukan dinyatakan secara etik”

“..dan saat ini novanto telah berhasil mengelabui sanksi jika mengacu pada peraturan DPR itu artinya Novanto masih bersih dan memenuhi syarat untuk kembali menduduki jabatan apapun di DPR”

Dengan perangkat *consequences*, Metro Tv menekankan citra parlemen yang akan memburuk sebagai akibat dari pemecatan Akbar Faisal ini sehingga kepercayaan publik pada parlemen pun akan menurun. Dan peristiwa ini akan diingat terus oleh publik sebagai citra buruk parlemen.

“..akan semakin men-downgrade parlemen ini di depan masyarakat dan mata masyarakat..tentunya ini akan menjadi citra buruk parlemen dikemudian hari.”

Metro menggambarkan konsekuensi dari bingkai yang telah dibangun. Dari perangkat ini juga diketahui bahwa Metro menitik beratkan konstruksi pada citra Setya Novanto yang tidak sportif, lari dari tanggung jawab. Perangkat ini juga sekaligus menjawab pernyataan dari Setya Novanto terkait pengunduran dirinya. Menurutnya, keputusan itu diambil agar masyarakat tidak gelisah dan berlarut-larut sehingga mengganggu kinerja DPR.

“Jadi kita tidak bisa mengatakan setyanovantomudur karena berjiwa besar dan kenegarawannya.”

Tabel 3.2 Tabel Framing Metro TV

<p><i>Framing Devices</i> (Perangkat framing)</p>	<p><i>Reasoning Devices</i> (Perangkat Penalaran)</p>
<p><i>Methapors</i> Bersilat lidah, ada udang di balik batu, seperti kentut, masuk angin, kodoknya Presiden ketawa, Mata masyarakat, Balik kandang sebagai ketua DPR Berjiwa besar</p>	<p><i>Roots</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sidang yang hari ini dilakukan dengan sedikit berbeda yakni dilakukan secara tertutup.. kalau publik sudah tahu, dibalik itu ada udang dibalik batu - kami akan lawan apa yang dilakukan Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR ini adalah tidak etis. Karena menyalahi etika dan penyalah

	<p>gunakan wewenang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - keputusan untuk mundur dari kursi Ketua Wakil Rakyat tidak perlu diapresiasi, menurutnya sikap Setya Novanto bukan sikap ksatria, Novanto mundur untuk menghindari sanksi
<p><i>Catchphrases</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sudahlah lama-lama kodok peliharaannya pak Jokowi bisa tertawa terbahak-bahak karena melihat kawan-kawan di MKD ini - Pemirsa drama yang disajikan mantan ketua DPR SetyaNovanto penuh dengan intrik politik. 	<p><i>Appeals to principle</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - saya tidak bisa menerima argumentasi siapapun dia kawan kawan di MKD, itu gimana yang bersangkutan meminta terbuka atau tertutup. - ini masalah etika bukan masalah hukum, kalau masalah hukum jelas tugas <i>lawyer</i>, kalau etika saya nggak ngerti, jadi di MKD ini apa yang harus dilakukan, merujuknya pada fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan - dan saat ini novanto telah berhasil mengelabui sanksi jika mengacu pada peraturan DPR itu artinya Novanto masih bersih dan memenuhi syarat untuk kembali menduduki jabatan apapun di DPR
<p><i>Depiction</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Anda tahu kentut? ada tapi tidak kelihatan, nah inilah yang sedang terjadi - Benar, saya ini anggota DPR sudah merasa malu, saya dari rumah naik taksi, orang ngeliat saya seperti mencibir, nah itu anggota DPR - hal ini adalah sebuah kezaliman yang dilakukan oleh pimpinan Dewan, dan tentu seluruh 	<p><i>Consequences</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - akan semakin men-<i>down grate</i> parlemen ini di depan masyarakat dan mata masyarakat, tentunya ini akan menjadi citra buruk parlemen dikemudian hari. - Jadi kita tidak bisa mengatakan Setya Novanto mudur karena berjiwa besar dan kenegarawannya

<p>masyarakat Indonesia akan melihat keadilan ini</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selama ini tidak pernah ada sidang MKD yang memberhentikan sekilat ini sehingga ini merupakan hal yang perlu diluruskan dan ini menjadi hal yang tidak benar menurut saya - dan akbar menjadi satu ikon di masyarakat yang tetap pada amanah yang dikehendaki rakyat terhadap kemurnian parlemen ini di kemudian hari - Menurutnya sikap SetyaNovanto bukan sikap ksatria - Dia pintar membaca situasi dan lihai memanfaatkan celah yang ada untuk kepentingan dirinya, 	
<p>Exemplaar</p> <p>Tidakkah anda lihat bahwa pertarungan, MKD, mahkamah kehormatan dewan yang seharusnya dijaga adalah kehormatan institusi dan anggotanya, tapi apa yang terjadi hari ini membuat masyarakat sangat kecewa, opini public sangat keras mengecam adanya perbedaan pada sidang hari ini</p> <p>Visual Images</p>  <p>NOVANTO MUNDUR BUKAN BERJIWA BESAR JAKARTA 15.02 JAJARAN KOARMABAR LAKUKAN SAR DUA KAPAL YANG BE METRO TV</p>	



2. Frame Sidang MKD TV One : Sidang MKD dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang

Konstruksi sidang MKD yang dibangun TV One cenderung pro terhadap pihak terlapor yaitu Setya Novanto. Hal ini terbukti dari laporan berita yang diturunkan oleh TV One dalam berita-beritanya yang selalu menekankan asas praduga tak bersalah terhadap Setya Novanto. Berita-berita yang diturunkan TV One ini menjadi satu kemasan konstruksi sidang MKD yang objektif karena sesuai dengan tata acara yang ada.

Perihal Citra MKD, TV One mengemasnya dalam berita yang mengangkat sidang yang menghadirkan terlapor di mana sidang dilaksanakan secara tertutup dengan tajuk berita "Sidang MKD". Berita ini

membangun citra MKD yang taat konstitusi. Dengan begitu, TV One menjawab polemik yang ada ditengah masyarakat, tentang kecurigaan adanya kong kalikong di tubuh MKD. Dari sudut pandang ini pula, TV One membenarkan ditutupnya jalannya sidang yang menghadirkan terlapor. Karena UU MD 3 membolehkan sidang dilakukan secara tertutup ataupun terbuka tergantung keputusan anggota MKD itu sendiri.

Kemudian peristiwa penonaktifan Akbar Faisal dari MKD yang menggambarkan citra jalannya sidang MKD itu sendiri. Akbar Faisal merupakan anggota MKD dari fraksi Nasdem yang gencar menyuarakan argumennya. Ia termasuk anggota MKD yang kritis dalam persoalan pencatutan nama Presiden. Namun, TV One mengemas penonaktifan Akbar Faisal dari MKD dengan sudut pandang yang berbeda, terkesan meredam opini publik. Dalam berita yang berjudul “Akbar Faisal Dinonaktifkan dari MKD”, TV One menyatakan bahwa Akbar dinoaktifkan karena melakukan pelanggaran.

Dalam berita ini, bahwa sidang MKD telah disepakati dilaksanakan secara tertutup. Namun Akbar merekam jalannya sidang dan menyebarkannya ke media massa. Hal ini yang menjadi dasar laporan aduan Ridwan Bae untuk memberhentikan Akbar Faisal. Secara tersirat, jalannya sidang MKD digambarkan tegas mentaati tata acara persidangan terwujud dengan pemecatan bagi anggota yang melanggar aturan.

Kemudian soal pengunduran diri Setya Novanto. TV One menghadirkannya dalam berita yang bertajuk “Sidang Putusan MKD”. Dalam berita ini secara terang-terangan TV One membela Setya Novanto. Citra yang dibangun adalah Setya Novanto mundur bukan karena bersalah namun karena moralnya sebagai ketua DPR yang tidak ingin masyarakat terganggu dengan kasus yang menyimpannya ini. Alasan pembenarnya ada pada alat bukti yang illegal, tidak bisa diverifikasi oleh MKD. Kemudian TV One juga menyerang Metro TV yang menggitng opini publik sehingga citra Setya Novanto menjadi buruk. TV One menempatkan Setya Novanto sebagai korban dengan harapan menarik simpati khalayak beritanya.

a. Elemen inti berita

Berita-berita TV One cenderung membela Setya Novanto dengan mengkonstruksi citra baik pelaksanaan sidang MKD. Gagasan yang pertama, TV One menempatkan tertutupnya sidang MKD dalam posisi kontroversi dalam artian sidang ini menuai perdebatan pro dan kontra. Namun TV One sendiri setuju dengan tertutupnya sidang. TV One bersandar pada UU yang mengatur jalannya sidang kode etik yang harusnya memang dilaksanakan secara tertutup.:

“Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan sempat memicu polemik, hal ini dikarenakan dua sidang sebelumnya digelar secara terbuka. Wakil Ketua DPR FadliZon dan FahriHamzah menilai sidang MKD harus dilakukan secara tertutup jika mengkaji pada Undang-undang (UU).”

Sidang MKD yang dihadiri terlapor, Setya Novanto dilaksanakan secara tertutup dengan alasan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan merupakan permasalahan yang pribadi. Dengan kata lain jika sidang terbuka akan merusak harkat martabat yang bersangkutan. TV One juga melabeli sidang bukan infotainment sehingga rakyat tidak perlu tahu.

“Coba lihat dulu bayangkan ada kasus video porno, video porno suruh sidang terbuka kemudian video porno tersebut diumbarkedepan publik dan mau apa Negara kita ini? Jadi tidak bisa seperti itu, sidang harus dilakukan secara tertutup. Belum lagi kasus yang lain, dan orang itu belum tentu juga bersalah kenapa harus di sidang harus terbuka.”

“Anda bayangkan etik itu artinya private sifatnya, karena itu tidak layak untuk dikonsumsi rakyat Indonesia. Kan tidak ada pentingnya orang dari Aceh sampai ke Papua menikmati tontonan ini, ini kan bukan infotainment.”

Selanjutnya, TV One juga menekankan baiknya pelaksanaan sidang MKD ketika terjadi penonaktifan Akbar Faisal sebagai anggota MKD. Dalam pandangan TV One penonaktifan Akbar Faisal dari MKD merupakan tindakan yang memang seharusnya dilakukan untuk menertibkan jalannya persidangan. Peristiwa ini juga menandakan bahwa sidang MKD benar-benar mengikuti tata cara persidangan yang benar dengan mengeluarkan anggota yang melakukan pelanggaran.

Penonaktifan Akbar Faisal berawal dari aduan yang dilakukan oleh Ridwan Bae atas tuduhan membocorkan isi persidangan kepada media massa. Kemudian ditindak lanjuti oleh Wakil Ketua Dewan dengan menurunkan surat keputusan penonaktifan tersebut. Sidang MKD yang dihadiri Setya

Novanto ini memang telah disepakati bersifat tertutup. Keputusan tersebut diambil dari rapat anggota MKD sebelumnya. Teks beritanya sebagai berikut :

“Ini karena bukan semata-mata karena Akbar Faisal kerap berkata keras atau vokal begitu dalam setiap kali sidang di MKD, namun karena Akbar Faisal saat ini statusnya menjadi teradu karena baru saja diadukan oleh salah satu dari anggota MKD karena Akbar Faisal diduga melakukan pelanggaran.”

Dari teks di atas pula, TV One menekankan pelanggaran tersebut sebagai alasan penonaktifan Akbar Faisal dan menyanggah kecurigaan publik bahwa Akbar Faisal disingkirkan untuk melancarkan kongkalikong sidang MKD karena terlalu kritis. Akbar Faisal adalah anggota MKD dari fraksi Nasdem yang sering keras dalam berpendapat di MKD untuk menuntut Setya Novanto.

Untuk menyanggah atau melawan Akbar Faisal, TV One mengangkat gagasan lain dalam berita ini yaitu keraguan keputusan MKD karena validitas alat bukti tidak bisa diverifikasi oleh MKD. Secara tidak langsung, pernyataan ini membantah apa yang dituntutkan oleh Akbar Faisal dan mengarah pada pembenaran penonaktifan Akbar Faisal. Harapannya agar khalayak ikut menyetujui penonaktifan ini. Teks beritanya sebagai berikut:

“Dan pemirsa jika kita merujuk pernyataan sejumlah pihak, seperti salah satunya wakil ketua DPR Fahri Hamzah yang menyatakan bagaimana MKD dapat menjatuhkan putusannya. Jika bukti-bukti yang digunakan dalam beberapa kali sidang dua pekan kemarin, kini belum terverifikasi atau belum dinyatakan validasinya karena saat ini bukti rekaman asli masih berada di Kejaksaan Agung.”

Dari teks di atas, TV One terlihat berusaha membangun citra Setya Novanto sebagai tokoh protagonis dengan musuh Akbar Faisal. Gagasan mengenai citra Novanto lebih terlihat pada peristiwa pengunduran diri Setya Novanto. TV One menilai pengunduran diri Setya Novanto bukan berarti dia bersalah, melainkan karena mengedepankan moralnya sebagai Ketua DPR. Dia tidak mau kegaduhan terus berlanjut. Penalaran konstruksi TV One ini merujuk pada alat bukti yang digunakan MKD yang tidak valid.

“Bahwa kemudian sudah jelas-jelas ada barang bukti yang diragukan keabsahannya atau data-data yang tidak valid ada keterangan-keterangan yang berbeda tapi kok terus digempur ke dia..”

TV One menempatkan Setya Novanto seolah-olah menjadi korban. Terjadinya polemik akan kasus ini karena penggiringan opini publik oleh media, secara terang-terangan TV One menyebut media tersebut yaitu Metro TV. Kegaduhan terjadi karena media ini terus menyerang Setya Novanto dengan pemberitaan yang memberatkannya.

“ini yang menurut saya adalah *the power public opinion* ini kekuatan publik yang luar biasa, dan penggiringan opini yang luar biasa dan saya berharap pak Setya Novanto tetap tegar kita akan bela sampai dimana beliau bisa membuktikan bahwa beliau tidak bersalah dan saya berharap pak Setya Novanto tetap tegar..”

“..saya dengan tim kuasa hukum yang khusus menangani terkait dengan laporan kami tentang Metro TV di dewan pers..”

Dari teks berita di atas jelas TV One ingin menyelamatkan citra Setya Novanto dimata publik. Dengan menempatkan media sebagai dalang kegaduhan, Setya Novanto dicitrakan sebagai orang yang tegar dan bijaksana.

b. Perangkat Framing

Pemikiran atau gagasan TV One ini didukung oleh pemakaian simbol-simbol untuk memberi penekanan citra baik pelaksanaan Sidang MKD. Perangkat framing ini setidaknya mengarahkan pada dua makna atas peristiwa sidang MKD yang dilaksanakan secara tertutup. Pertama, jika mengkaji pada UU sidang harus dilangsungkan dengan tertutup, walaupun pada sidang sebelumnya digelar secara terbuka. Perangkat framing (*catchprasse*) dibawah ini mengarahkan pemaknaan pada membenaran tertutupnya sidang berdasarkan UU dan menyampingkan kecurigaan mengenai alasan kenapa sidang tertutup pada saat menghadirkan Setya Novanto, sedangkan sidang yang menghadirkan Sudirman Said dan Ma'roef Sjammoeddin dilaksanakan secara terbuka.

“Sidang terbuka atau tertutup kita harus kembali kepada UU”

Pembenaran tersebut juga diperkuat dengan perangkat *exemplaar* yang merujuk pada frame Indonesia sebagai Negara berkonstitusi yang mematuhi UU, sebagai berikut :

“Negara RI punya aturan konstitusi punya UU, kalau anda mau melanggar UU silahkan tapi UU mengatakan sidang harus bersifat tertutup.”

Kedua, TV One mengkonstruksi sidang kode etik digelar tertutup untuk menjaga kehormatan terlapor. Sidang MKD dilabeli (*depiction*) sebagai

sidang yang *private* karena persoalan yang dibahas adalah persoalan etik. Selain itu persidangan dianggap tidak layak dan tabu untuk dilihat oleh masyarakat, mengingat persidangan menyangkut harkat dan martabat ketua DPR RI.

“Anda bayangkan etik itu artinya *private* sifatnya, karena itu tidak layak untuk dikonsumsi rakyat Indonesia.”

Konstruksi dalam berita diperjelas dengan *exemplaar* yaitu membandingkan sidang MKD dengan kasus video porno. Seperti yang orang tahu, video porno adalah rekaman gambar yang bersifat asusila, melanggar norma masyarakat dan tabu, baik pelaku maupun yang melihat pasti merasa malu.

“Coba lihat dulu bayangkan ada kasus video porno, video porno suruh sidang terbuka kemudian video porno tersebut diumbarkedepan publik dan mau jadi apa Negara kita ini?”

Mengenai pengunduran diri Setya Novanto, frame TV One dibentuk dengan perangkat *cathchphrases* yang menonjolkan Setya Novanto sebagai korban penggiringan opini oleh media massa yang dinilai selalu menyerangnya dalam berita-beritanya. Sehingga nama Novanto buruk di hadapan khalayak media. Selain itu polemik seputar kasus pancatutan nama Presiden ini dianggap hanya karena kuatnya pengaruh media terhadap opini publik. Teks beritanya sebagai berikut:

“karena kami merasa betul kali ini betapa kuatnya media menggempur pak Setya Novanto”

“jadi beliau ini yang menurut saya adalah *the power public opinion* ini kekuatan public yang luar biasa dan penggiringan opini yang luar biasa”.

Kemudian citra Novanto sebagai korban juga didukung pada bantuan gambar pada background pembawa acara/ *news anchor* yang diberi keterangan “Sidang MKD”. *Background* tersebut menampilkan foto Sudirman Said dan Ma’roef Sammsoeddin bukan foto Setya Novanto. Pemberitaan ini merupakan manipulasi simbol untuk membela Setya Novanto, padahal tokoh sentral dalam kasus papa minta saham ini adalah Setya Novanto, akan tetapi pada gambar tersebut tidak ditampilkan foto Setya Novanto. TV One berusaha menjaga citra Setya Novanto dengan tidak menampilkan fotonya sebagai pihak terlapor, seakan-akan dia tidak terlibat dengan kasus ini melainkan hanya sebagai korban. Gambar sebagai berikut:



Gambar Screenshot berita “Sidang MKD”

Kemudian TV One mengangkat cacatnya pelaksanaan sidang MKD dalam hal alat bukti yang tidak bisa divalidasi oleh MKD. Pernyataan ini terkesan memihak kepada Setya Novanto pula. Kejanggalan sidang MKD tersebut diuraikan dengan menjelaskan rujukan pembedaannya yaitu peraturan DPR no 2 yang membolehkan MKD memverifikasi alat bukti setiap proses sidang MKD (*exemplaar*). Sedangkan dalam persidangan ini bukti rekaman asli ada di Kejagung. Teks beritanya sebagai berikut:

“Padahal di dalam tata beracara MKD yang ada diperaturan DPR nomor 2 Tahun 2015, MKD bisa melakukan verifikasi terhadap alat bukti dalam setiap kali persidangan yang ada di MKD.”

Selanjutnya TV One membangun citra Novanto dengan melabelinya *depiction* sebagai pribadi yang tegar, kekeh dan bijaksana. Walaupun media massa terus mencecarnya ia menghadapinya dengan senyuman. Citra turut membentuk frame berita ini.

“..saya berharap pak Setya Novanto tetap tegar..”

“..bahwa beliau tidak bersalah ini masalah moral saja bukan benar atau salah seperti itu”

“..kekeh luar biasa pak setya novanto masih bisa senyum..”

Kemudian frame diperkuat dengan perangkat *exemplaar* dengan membandingkan dengan bingkai berupa uraian yang menyatakan alat bukti yang tidak valid pada sidang tersebut. Pernyataan ini bersumber dari pakar-pakar yang dimintai keterangan oleh kuasa hukum Setya Novanto. Teks beritanya sebagai berikut:

“..maka saya minta pakar-pakar beberapa hari yang lalu ada delapan pakar yang mengatakan bahwa barang bukti tidak ditemukan bahwa tidak jelas siapa pengadunya, siapa pelapornya siapa terlapornya,”

Selain itu perangkat *exemplaar* yang lain ditujukan menghakimi media massa yang memojokan Setya Novanto. TV One menggunakan data hasil pengaduan kuasa hukum Setya Novanto ke Dewan pers yang kemudian ditemukan pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh salah satu media massa. Pelanggaran yang dilakukan adalah tidak diberinya ruang kepada Setya Novanto untuk mengklarifikasi apapun langkah atau tindakannya selama sidang MKD berlangsung. Berikut teks beritanya:

“ada satu titik bahwa ada satu media memang pada satu poin dia telah melakukan satu tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, disana tidak memberi ruang kepada pak Setya Novanto untuk menyampaikan bahwa ia tidak bersalah, ruang itu tidak ada, jadi dihakimi secara keinginan publik sedemikian rupa..”

c. Perangkat Penalaran

Dalam teks berita TV One “Sidang MKD” memakai perangkat penalaran yang membenarkan sidang MKD dilaksanakan secara tertutup. Dengan menggunakan strategi *roots* yaitu karena terlapor belum tentu bersalah. TV One menggunakan asas peradilan praduga tak bersalah, mengingat kehormatan terlapor sebagai taruhannya.

“..sidang harus dilakukan secara tertutup. Belum lagi kasus yang lain, dan orang itu belum tentu juga bersalah kenapa harus di sidang harus terbuka.”

Selanjutnya, pembenaran sidang tertutup dengan menyandarkan kepada UU. Tata cara persidangan MKD harusnya berpatokan pada UU,

bukan pada kemauan pribadi. Dengan pembenar seperti ini, TV One mengesankan bahwa sidang tertutup bukan karena keinginan SetyaNovanto melainkan sesuai dengan UU. Sedangkan kepada pihak yang tidak setuju dianggap hanya menuntut dengan kemauan pribadi saja. (*appeals to principle*) sebagai berikut:

“Sidang MKD harus dilakukan secara tertutup jika mengkaji pada Undang-undang (UU)..”

“..karena kalau kita tidak membaca UU susah, maunya nurutin kemauan pribadi, apalagi berbicara masalah sidang MKD..”

Sidang MKD yang mengadili kasus etik dinilai sebagai masalah yang bersinggungan dengan privasi seseorang. Sehingga masyarakat tidak punya kepentingan untuk menyaksikan dan mengetahui jalannya sidang MKD. Perangkat penalaran *consequency* berikut ini :

“Kan tidak ada pentingnya orang dari Aceh sampai ke Papua menikmati tontonan ini, ini kan bukan infotainment..”

Kemudian perangkat penalaran *roots* digunakan oleh TV One untuk meyakinkan khalayak bahwa tindakan penonaktifan Akbar Faisal oleh MKD adalah tindakan yang benar-benar atas dasar menertibkan jalannya sidang MKD. Tindakan MKD berdasarkan keputusan MKD murni tanpa ada maksud politik tertentu.

“Ini karena bukan semata-mata karena Akbar Faisal kerap berkata keras atau vokal begitu dalam setiap kali sidang di MKD, namun karena Akbar Faisal saat ini statusnya menjadi teradu karena baru saja diadukan oleh salah satu dari anggota MKD karena Akbar Faisal diduga melakukan pelanggaran.”

Dengan teks berita dia atas TV One sekaligus membantah opini publik yang mencurigai pemecatan Akbar Faisal sebagai salah satu upaya untuk melancarkan penyelamatan Setya Novanto. Mengingat dia adalah salah satu tokoh yang keras suaranya untuk menuntut Setya Novanto. Sebaliknya, TV One menyandarkan frame berita ini pada premis (*appeals to principle*) sidang telah disepakati anggota MKD untuk dilaksanakan secara tertutup. oleh karenanya siapapun yang membocorkan jalannya persidangan kepada public akan dikenai sanksi. Termasuk Akbar Faisal yang kedapatan merekam dan memberikan rekaman jalannya sidang kepada media masa. Teks beritanya sebagai berikut:

“Akbar Faisal pada saat persidangan MKD yang menghadirkan pihak teradu Ketua DPR Setya Novanto beberapa waktu lalu, yang saat itu sidang diputuskan digelar secara tertutup. Namun Akbar Faisal diduga merekam jalannya persidangan dan kemudian membocorkan persidangan atau isi rekaman jalannya persidangannya tersebut kepada publik.”

Selanjutnya TV One menyertakan juga konsekuensi dari bingkai yaitu Akbar Faisal tidak diperbolehkan menjadi anggota MKD lagi. Hal ini disebabkan karena perbuatannya sendiri. Teks beritanya sebagai berikut :

“Akbar tidak diperbolehkan menjalani tugas dan fungsinya sebagai salah satu anggota MKD dalam kasus apa pun termasuk salah satunya kasus dugaan pelanggaran etik yang menimpa ketua DPR Setya Novanto.”

Penalaran selanjutnya adalah keraguan MKD akan bisa menjatuhkan vonis kepada Setya Novanto karena alat bukti yang tidak valid. Hal ini secara

tidak langsung membantah apa yang sering Akbar Faisal suarakan dalam persidangan MKD yaitu untuk menuntut Setya Novanto. Sehingga pada akhirnya, penonaktifan Akbar Faisal dianggap wajar. Teks beritanya sebagai berikut:

“.. wakil ketua DPR Fahri Hamzah yang menyatakan bagaimana MKD dapat menjatuhkan putusannya. Jika bukti-bukti yang digunakan dalam beberapa kali sidang dua pekan kemarin, kini belum terverifikasi atau belum dinyatakan validasinya karena saat ini bukti rekaman asli masih berada di Kejaksaan Agung.”

Dari teks diatas juga bisa ditarik pemahaman bahwa Setya Novanto tidak bisa diadili karena kelemahan alat bukti. TV One memperkuat citra baik Setya Novanto dengan penalaran *roots* yaitu ketika pengunduran diri dilakukan Setya Novanto yang dilakukan bukan karena ia bersalah melanggar kode etik anggota DPR, namun lebih karena mengedepankan moralnya sebagai Ketua DPR. Ia tidak ingin mengahiri polemik yang berkembang di tengah masyarakat. Berikut teks beritanya:

“Pak Setya Novanto mengundurkan diri bukan karena ia bersalah tapi lebih kepada bahwa moral yang dikedepankan dan dia akan bertanggung jawab kalau ia tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan seperti itu”

Agar konstruksi pengunduran diri dapat diterima secara logis, Tv One membangun citra Setya Novanto sebagai pihak yang tidak bersalah dengan cara ditempatkan oleh TV One sebagai korban penggiringan opini oleh media. Oleh karena itu konsekuensi dari bingkai ini adalah tim tindakan kuasa hukum

Setya Novanto melaporkan Metro TV ke dewan pers atas dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik. Berikut teks beritanya:

“..karena begitu gencarnya tekanan sekali lagi kami pun menempuh cara-cara melaporkan katakanlah media itu,”

Untuk mendukung frame tersebut, TV One menyandarkan premis (*appeals to principle*) yang berasal dari pembelaan diri oleh Setya Novanto. Dia mengklaim pembicaraannya dengan Ma’roef dan Riza Chalid hanya sebatas pembicaraan biasa. Dan inisiator pertemuannya adalah Maroef Sammsoedin. Di sini, TV One seolah-olah menempatkan Setya Novanto dijebak oleh Sammsoedin. Selain itu, TV One juga mempermasalahkan alat bukti persidangan. Dalam teks berikut ini:

“Pak Novanto mengatakan kepada saya bahwa sebenarnya beliau itu hanya bicara apa adanya tidak ada yang istimewa pada pembicaraan itu, sebagai mantan seorang pengusaha beliau itu berkomunikasi dan pertemuan itu justru diminta oleh bapak Maroef Sammsoedin sendiri”

“Bahwa kemudian sudah jelas-jelas ada barang bukti yang diragukan keabsahannya atau data-data yang tidak valid ada keterangan-keterangan yang berbeda”

Tabel 3.3 Tabel Framing TV One

<p style="text-align: center;"><i>Framing Devices</i> (Perangkat framing)</p>	<p style="text-align: center;"><i>Reasoning Devices</i> (Perangkat Penalaran)</p>
<p><i>Methapors</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkata keras atau vokal 	<p><i>Roots</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ..sidang harus dilakukan secara tertutup. Belum lagi kasus yang lain, dan orang itu belum tentu juga bersalah kenapa harus di

-	<p>sidang harus terbuka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ini karena bukan semata-mata karena Akbar Faisal kerap berkata keras atau vokal begitu dalam setiap kali sidang di MKD, namun karena Akbar Faisal saat ini statusnya menjadi teradu karena baru saja diadakan oleh salah satu dari anggota MKD karena Akbar Faisal diduga melakukan pelanggaran. - .. wakil ketua DPR Fahri Hamzah yang menyatakan bagaimana MKD dapat menjatuhkan putusannya. Jika bukti-bukti yang digunakan dalam beberapa kali sidang dua pekan kemarin, kini belum terverifikasi atau belum dinyatakan validasinya karena saat ini bukti rekaman asli masih berada di Kejaksaan Agung.
<p><i>Cathchphrases</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sidang terbuka atau tertutup kita harus kembali kepada UU - karena kami merasa betul kali ini betapa kuatnya media menggempur pak Setya Novanto - jadi beliau ini yang menurut saya adalah <i>the power public opinion</i> ini kekuatan public yang luar biasa dan penggiringan opini yang luar biasa 	<p><i>Appeals to principle</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sidang MKD harus dilakukan secara tertutup jika mengkaji pada Undang-undang (UU), - karena kalau kita tidak membaca UU susah, maunyanurutin kemauan pribadi, apalagi berbicara masalah sidang MKD - ..melanggar peraturan yang telah disepakati dalam sidang MKD yang pada saat itu menghadirkan pihak teradu Setya Novanto dimana telah diputuskan sidang digelar secara tertutup - bukti-bukti yang digunakan dalam beberapa kali sidang dua pekan kemarin, kini belum

	<p>terverifikasi atau belum dinyatakan validasinya karena saat ini bukti rekaman asli masih berada di Kejaksaan Agung.</p>
<p><i>Depiction</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Anda bayangkan etik itu artinya <i>private</i> sifatnya, karena itu tidak layak untuk dikonsumsi rakyat Indonesia. - saya berharap pak Setya Novanto tetap tegar - bahwa beliau tidak bersalah ini masalah moral saja bukan benar atau salah seperti itu - kekeh luar biasa pak setya novanto masih bisa senyum - betapa kuatnya media menggempur pak Setya Novanto 	<p><i>Consequences</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kan tidak ada pentingnya orang dari Aceh sampai ke Papua menikmati tontonan ini, ini kan bukan infotainment. - Akbar tidak diperbolehkan menjalani tugas dan fungsinya sebagai salah satu anggota MKD dalam kasus apa pun termasuk salah satunya kasus dugaan pelanggaran etik yang menimpa ketua DPR Setya Novanto.
<p><i>Exemplaar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Coba lihat dulu bayangkan ada kasus video porno, video porno suruh sidang terbuka kemudian video porno tersebut diumbarkedepan publik dan mau jadi apa Negara kita ini? - Negara RI punya aturan konstitusi punya UU, kalau anda mau melanggar UU silahkan tapi UU mengatakan sidang harus bersifat 	

<p>tertutup.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Padahal di dalam tata beracara MKD yang ada diperaturan DPR nomor 2 Tahun 2015, MKD bisa melakukan verifikasi terhadap alat bukti dalam setiap kali persidangan yang ada di MKD - maka saya minta pakar-pakar beberapa hari yang lalu ada delapan pakar yang mengatakan bahwa barang bukti tidak ditemukan bahwa tidak jelas siapa pengadunya, siapa pelapornya siapa terlapornya, - ada satu titik bahwa ada satu media memang pada satu poin dia telah melakukan satu tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, disana tidak memberi ruang kepada pak Setya Novanto untuk menyampaikan bahwa ia tidak bersalah, ruang itu tidak ada, jadi dihakimi secara keinginan publik sedemikian rupa <p>Visual Images</p> <p>Unsur gambar pada background pembawa acara/ news anchor yang menampilkan foto Sudirman Said dan Ma'roef Samsoeddin bukan foto SetyaNovanto.</p>	
---	--



3. Perbedaan Frame Metro TV dan TV One

Peristiwa sidang MKD disikapi secara berbeda oleh kedua media terbukti dari frame yang dikemas dalam berita. Sudut pandang yang digunakan bertolak belakang satu sama lain. Mulai dari fakta-fakta yang dipilih hingga penyampaiannya informasi dilakukan secara berbeda.

Konstruksi yang dibentuk oleh Metro TV adalah sidang MKD memihak kepada Setya Novanto. Sedangkan TV One mengemas Sidang MKD berjalan dengan objektif dan sesuai dengan UU yang berlaku. Keduanya membangun konstruksinya dengan menghasilkan makna atas

peristiwa sidang MKD dengan sudut pandangnya masing-masing. Setidaknya terdapat tiga tindakan yang biasa dilakukan pekerja media khususnya oleh para komunikator massa tatkala melakukan konstruksi realitas termasuk realitas politik yang berujung pada sebuah citra politik : pemilihan simbol (fungsi bahasa); pemilihan fakta yang akan disajikan (strategi *framing*) dan ketersediaan memberi tempat (*agenda setting*) (Hamad 2004 : 16).

Baik Metro TV maupun TV One memilih fakta-fakta yang berbeda dalam menyikapi proses sidang MKD, fakta yang mendukung sidang MKD maupun tidak. Kemudian fakta tersebut disampaikan dengan memilih simbol bahasa yang tepat sehingga menarik perhatian khalayak. Metro TV cenderung memilih fakta-fakta tentang keganjilan prosesi sidang MKD dan mengarahkannya kepada kepentingan penyelamatan Setya Novanto. Kemudian cenderung dikemas dengan bahasa yang berkonotasi buruk semisal “kentut”, “ada udang di balik batu”, “kezaliman”, “kodoknya Presiden tertawa”, “intrik politik” hingga “sikap tidak ksatria”. Selain itu disertakan pula penalaran dengan sudut pandang yang memojokan MKD maupun Setya Novanto.

Sedangkan TV One justru memilih fakta-fakta yang secara terang-terangan ataupun tersirat membela Setya Novanto dengan menempatkan posisinya seolah-olah sebagai korban pengiringan opini publik oleh pihak tertentu. Pemakaian kata-katanya terkesan menyelamatkan Setya Novanto.

TV One lebih menekankan konstruksinya dengan menggunakan strategi penalaran-penalaran yang menyanggah opini buruk tentang jalannya sidang MKD dan terkesan menutup-nutupi pelanggaran etik yang dilakukan Setya Novanto.

Setidaknya, terdapat tiga makna pada peristiwa sidang MKD yang dikonstruksi oleh Metro TV dan TV One. Pertama mengenai citra MKD, Metro TV menilai anggota MKD “masuk angin” dengan maksud telah melakukan kompromi politik dengan Setya Novanto. Kompromi politik yang menguntungkan Setya Novanto berlawanan dengan kepentingan publik. Sedangkan TV One menganggap MKD mematuhi Undang-Undang. Dengan begitu citra MKD tertib dalam memikul amanat rakyat.

Kedua, perihal jalannya Sidang MKD. Metro TV mencurigai adanya kecurangan-kecurangan selama sidang berlangsung. Penalaran yang dikembangkan adalah kegagalan pemecatan Akbar Faisal yang dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang oleh Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR. Sebaliknya TV One justru mengesankan Sidang MKD berlangsung tertib terbukti dengan pemecatan anggota yang melakukan pelanggaran yaitu Akbar Faisal.

Ketiga, perihal citra Setya Novanto. Metro TV cenderung mengemas sidang MKD dengan sudut pandang untuk menjatuhkan kredibilitas Setya Novanto. Sidang MKD dikonstruksi memihak kepada Setya Novanto.

Pengunduran diri Setya Novanto dinilai sebagai strateginya untuk mengelabui sanksi MKD. Oleh karenanya citra Novanto bisa digambarkan sebagai seorang pengecut yang lari dari tanggung jawab. Sedangkan TV One secara terang-terangan membela Setya Novanto. Pengunduran diri yang dilakukan Setya Novanto bukan karena dia bersalah, tetapi karena mengedepankan moral. Novanto dicitrakan sebagai orang yang tegar dan bijaksana.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberitaan

Perbedaan konstruksi sidang MKD yang ditunjukkan dari bingkai berita kedua televisi tersebut memiliki faktor-faktor yang andil dalam pembentukannya. Menurut *hierarchy of influent* dari Shoemaker dan Reese, pembentukan frame berita dipengaruhi faktor individu, rutinitas media, struktur organisasi media, ideologi media dan faktor ekstra media seperti narasumber, sumber penghasilan media serta lembaga-lembaga yang mengatur pers di Indonesia (Sudibyo, 2001:7-13).

Faktor Individu yang mempengaruhi pembentukan frame berita adalah pekerja media itu sendiri. Hal-hal yang mungkin mempengaruhi isi media diantaranya latar belakang personal (tanah kelahiran, jenis kelamin, usia, agama, pendidikan formal maupun informal), pengalaman organisasi atau pekerjaan, nilai yang dianut, bahkan sampai kecendrungan orientasi politik

tertentu. Termasuk juga dalam faktor ini adalah perilaku pemahaman terhadap nilai kepercayaan, serta orientasi profesional jurnalis tersebut (Sudibyo, 2001:7). Salah satu individu yang dimaksud adalah wartawan sebagai ujung tombak media di lapangan. Wartawanlah yang membentuk peristiwa: mana yang disebut berita dan mana yang tidak. Peristiwa dan realitas bukanlah diseleksi, melainkan dikreasi oleh wartawan. Wartawan berinteraksi dengan dunia (realitas) dan dengan orang yang diwawancarai, dan sedikit banyak menentukan bagaimana bentuk dan isi berita yang dihasilkan. (Fishman dalam Eriyanto, 2002: 116).

Wartawan sangat berperan dalam pembentukan konstruksi dalam berita. Setidaknya dapat diamati dari pertanyaan-pertanyaannya yang cenderung mengarahkan narasumber kepada frame yang akan ditampilkan dalam berita. Seperti Wartawan Metro TV yang cenderung mengarahkan pernyataan kepada spekulasi buruk sidang MKD. Pada liputan mengenai Sidang MKD yang dilaksanakan tertutup oleh wartawan Metro TV, Aviani Malik, terlihat sekali mengarahkan wawancara pada spekulasi adanya kompromi politik sebagai alasan tertutupnya sidang. Dengan mengatasnamakan kecaman publik atas tertutupnya sidang, wawancara diarahkan pada melencengnya fungsi MKD yang akan memperburuk citra MKD dimata khalayak berita. Selain itu, wartawan atau reporter Metro TV

juga melontarkan pertanyaan yang bernada curiga tentang adanya suap oleh Setya Novanto kepada anggota MKD.

“Tidakkah anda lihat bahwa pertarungan, MKD, mahkamah kehormatan dewan yang seharusnya dijaga adalah kehormatan institusi dan anggotanya, tapi apa yang terjadi hari ini membuat masyarakat sangat kecewa, opini publik sangat keras mengecam adanya perbedaan pada sidang hari ini ?”
Dalam artian ada sesuatu? Apakah itu uang ditawarkan, jabatan atau apa?

Berbeda dengan Metro TV, pertanyaan-pertanyaan reporter TV One justru terlihat mengakomodasi pihak Setya Novanto untuk menyampaikan pembelaan kepada khalayak, sehingga konstruksi Setya Novanto digambarkan sebagai korban yang tidak bersalah dan sosok yang tegar dan bijaksana. Di sini, TV One menghilangkan sudut pandang kegagalan MKD karena tidak bisa menjatuhkan putusannya.

Dalam berita pengunduran diri Setya Novanto, reporter TV One, Balques Manisang, mewawancarai kuasa hukum Setya Novanto yaitu Razman Arief Nasution. Menurutnya, pengunduran diri diklaim bukan untuk menghindari sanksi melainkan karena Setya Novanto mengedepankan moralnya untuk menjaga martabat anggota DPR dan untuk menenangkan rakyat. Dari keterangan kuasa hukumnya ini pula, Setya Novanto digambarkan seolah-olah menjadi korban penggiringan opini oleh media massa. Pertanyaan dari reporter TV One yang dikenal kritis ini malah terkesan hanya memoderasi keterangan dari kuasa hukum Setya Novanto.

“Kita masih di *breaking news* TV One, kita mau klarifikasi benarkah atau tidak klien anda ketua DPR pak Setya Novanto sudah mengambil langkahnya di tengah-tengah proses sidang MKD ini bagaimana bang yang terbaru bang? Silahkan”

“Apa tuduhan yang paling menekan klien anda pak Setya Novanto bang razman?”

Selanjutnya, faktor pemilik media juga berpengaruh pada pembentukan konstruksi sidang MKD ini. Dilihat dari kepemilikan, TV One merupakan salah satu media dari Viva Group dibawah Group Bakrie, kepunyaan politikus Golkar Abu Rizal Bakrie. Tokoh ini memang dikenal sebagai salah satu pengusaha dan pemilik kerjaan media di Indonesia. Begitu pula dengan Surya Paloh, Politikus Nasdem yang juga dikenal sebagai pengusaha sukses di berbagai bidang. Ia juga diketahui memiliki lebih dari satu media massa dibawah bendera Media Group, termasuk Metro TV yang ia dirikan pertama kali pada tahun 2000.

Dari hasil penelitian ini, pemilik Metro TV maupun TV One terlihat menggunakan medianya untuk kepentingan partainya, dalam hal citra kader maupun partai secara keseluruhan. Citra ini menjadi penting karena kepercayaan masyarakat adalah modal untuk mencapai kekuasaan. Hal itu merupakan indikasi, bahwa pemilik media yang sekaligus pengusaha cenderung untuk mendahulukan kepentingan golonganya daripada kepentingan umum dibandingkan dengan pemilik yang juga wartawan (Keller, 2009:105). Hal ini menyebabkan pers tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial. Pemenuhan tugas

kemasyarakatan dari wartawan dalam arti fungsi informasi, fungsi kritik dan fungsi pembentukan opini dari pers terganggu oleh kepentingan pribadi dari pemilik media (Keller, 2009:105).

Selama proses sidang MKD, Metro TV cenderung melemahkan kredibilitas Golkar dan Setya Novanto. Sebaliknya TV One pun tidak malu-malu membela Setya Novanto. Kedua televisi tersebut juga berusaha mengarahkan jalannya sidang MKD secara politis melalui pembentukan opini publik. Televisi menjadi alat untuk menjatuhkan lawan atau pesaing politik. Rivalitas politik pun hadir kemudian hadir dalam ruang redaksi. Di sini para pemilik media tidak hanya berupaya mendongkrak pencitraan dirinya, tapi juga berupaya menurunkan popularitas rival politiknya. Di sini ada taktik meninggikan setinggi-tinggi dirinya dan menenggelamkan sedalam-dalam lawan politiknya (Riyanto dkk, 2014: 141-142).

Perbedaan bingkai Metro TV dan TV One dipengaruhi pula dengan faktor di luar media tersebut seperti narasumber berita. Narasumber berita yang mempunyai kepentingan tertentu, yang lewat kampanye *public relations* dan *pressure group* dapat mempengaruhi proses konstruksi realitas di dalam media (Sudiby, 2001:11). Metro TV misalnya, cenderung mengkonfirmasi beritanya dari narasumber yang mengkritisi jalannya sidang MKD. Seperti Wakil Ketua Fraksi Nasdem Irma Surya Chaniago, mantan anggota MKD dari fraksi Nasdem Fadholi dan Ruhut Sitompul dari Fraksi Demokrat. Politikus

ini bisa di istilahkan lawan dari Golkar, tempat Setya Novanto bernaung. Sedangkan di pihak TV One mengambil narasumber dari, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (PKS) dan Fadli Zon (Gerindra). Pendapat mereka cenderung membela Setya Novanto. Media sangat tergantung pada sumber elit politik karena keahlian dan jabatan mereka dalam struktur politik. Akibatnya ada kemungkinan media menjadi alat politik para elit (Simarmata, 2014:26).

Pernyataan-pernyataan politikus tersebut diatas secara tidak langsung merupakan komunikasi politik kepada khalayak media, sehingga mampu membentuk opini publik mengenai sidang MKD maupun Setya Novanto sendiri. Narasumber berita memiliki kepentingan tersendiri serta memberlakukan politik media dalam informasinya (Shoemaker dan Reese dalam Sudiby, 2001 : 10). Hal ini berkaitan dengan komunikasi politik yang dilakukan politisi dengan memanfaatkan ekspose oleh media massa. Para elit politik punya kecenderungan menancapkan pengaruh pada media massa untuk mengontrol proses politik (Wolfsed dan Shiefer dalam Simarmata, 2014: 21).

Faktor pembentuk konstruksi yang terakhir adalah ideologi yang diartikan sebagai kerangka berfikir tertentu, dimiliki oleh institusi media maupun orang-orang di dalamnya dan digunakan sebagai cara dalam melihat, menghadapi, dan menafsirkan realitas tertentu. Ideologi ini menyoroti pihak yang berkuasa dimasyarakat, serta bagaimana kekuatan itu berperan dalam menentukan agenda media (Sudiby, 2001:12). Pada produksi berita,

wartawan maupun redaksi akan mengemas sedemikian rupa hingga terasa dekat dengan khalayak. Hal ini dilakukan dengan menempatkan konstruksi pada nilai atau ideologi yang dominan di masyarakat. Sehingga secara tidak langsung berita juga terpengaruh oleh ideologi masyarakat. Pada berita politik khususnya, agenda media juga terpengaruh pada ideologi elit politik, terbukti dari pendapat-pendapat narasumber mempunyai kecenderungan berbeda bahkan bertolak belakang sesuai dengan ideologi politik yang ingin disampaikan olehnya.